

Ketua DPRD Grobogan Berharap Seorang PPL Bawahi Satu Desa



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos mengaku prihatin perihal jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) di daerahnya tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang ada. Saat ini penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan hanya ada 68 orang. Terdiri 28 berstatus ASN, dan 40 orang lainnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Padahal Kabupaten Grobogan ada 273 desa dan 7 kelurahan. Tetapi jumlah penyuluh pertanian hanya ada 68 orang. Ini berarti ada penyuluh yang membawahi dua hingga tiga desa. Idealnya satu penyuluh membawahi satu desa," ujarnya, Senin (7/2).

Agus mengetahui jumlah tenaga penyuluh pertanian setelah menerima perwakilan penyuluh pertanian di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Menurutnya, keberadaan penyuluh pertanian sangat dibutuhkan para petani. PPL memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan ke-

pada petani melalui pendekatan kelompok tani. Hal itu dilakukan agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani.

"Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, terutama padi, dibutuhkan peran penyuluh. Jika jumlah penyuluh terbatas akan berdampak kepada keberhasilan, dan kesinambungan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu penyangga pangan nasional," terang Agus. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan tenaga penyuluh juga menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian. Misalnya dengan memberikan tunjangan fungsional sesuai jabatan yang diemban. "Namun demikian, saya juga mengajak kepada tenaga penyuluh pertanian untuk meningkatkan dedikasi dan integritas dalam pengabdian. Diharapkan juga mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk menjadi petani milenial," harapnya.

Agus juga berharap,

muncul penyuluh swadaya yang dibentuk di masing-masing desa guna melengkapi tugas PPL yang ada. Pasalnya, lanjut Agus, luas lahan pertanian di Kabupaten Grobogan ada sekitar 136.209 hektare, dengan produksi padi yang diperoleh sekitar 772.500 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan beras sekitar 443.196 ton. Dengan produksi sebesar itu, Kabupaten Grobogan menjadi daerah penghasil padi terbesar di Jateng.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Dr Sunanto SST MP,

menambahkan, tugas dan peran PPL memang sangat dibutuhkan. Terlebih saat ini Kabupaten Grobogan tengah menggiatkan program percepatan luas tambah tanam (LTT) padi, jagung dan kedelai (pajale).

"Saya berharap agar PPL terus melakukan pendampingan ke kelompok tani agar dapat menerapkan dan mengadopsi teknologi budidaya yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Di antaranya dengan mendukung program Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) padi IP-400, padi biofortifikasi, jagung dan kedelai," tandas Sunanto.

Ditambahkan, untuk menjalankan program tersebut, PPL harus bekerja keras de-

ngan melakukan pendekatan dan koordinasi semua pihak. Program IP-400 tersebut bisa ditempuh dengan dua strategi, yaitu rekayasa teknologi dan sosial untuk optimalisasi ruang dan waktu sehingga indeks pertanaman dapat dimaksimalkan. Guna meningkatkan kapasitas PPL, pihaknya juga telah mengikutsertakan PPL untuk mengikuti sosialisasi aplikasi E-Reporting. Aplikasi ini merupakan sistem digitasi peta poligon melalui foto open kamera. Di dalamnya memuat perhitungan dan pelaporan luas lahan pertanian.

Aplikasi E-Reporting terintegrasi dengan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), sehingga proses pemetaan luas wilayah pertanian terhubung dengan data kelompok tani di Simluhtan tersebut. Data aplikasi berbasis spasial atau poligon ini akan termonitor secara online. Dengan adanya aplikasi E-Reporting, penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat membuat digitasi poligon sesuai luas lahan pertanian di wilayah masing-masing. "Kami harapkan aplikasi ini bisa disampaikan kepada teman-teman penyuluh lainnya," harap Sunanto. (Tas)



KR-Taslim
Suasana ketika DPRD Grobogan menerima para penyuluh.

Isoter Bertambah, Prokes Harus Ditingkatkan

MAGELANG (KR) - Upaya pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri sebagai regulator dan fasilitator. Karena itu masyarakat di Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus yakin dan bisa. Demikian dikemukakan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH kepada KR usai berbicara di forum sosialisasi Pokmas di Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Senin (7/2).

Walikota Magelang mengatakan bahwa yang penting memiliki niat yang baik untuk bagaimana menghidupkan masyarakat secara bersama-sama, sehingga anggaran yang turun ke masyarakat dapat benar-benar memberdayakan. Dalam kesempatan ini Walikota Magelang juga membenarkan ada penam-

bahan jumlah warga yang menjalani isolasi terpusat (isoter) kasus Covid-19. Walikota Magelang meminta masyarakat agar benar-benar berhati-hati, protokol kesehatan (prokes) harus tetap dijalankan.

Kenaikan atau penambahan diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa hari mendatang,

hanya saja tidak seberat Bulan Juni dan Juli 2021 lalu. Belum diketahui secara pasti jenis apa yang terjadi di wilayah Kota Magelang saat ini. "Alhamdulillah karena imunitas kita semakin baik, kondisi aman," katanya. Sampai Senin pagi kemarin diinformasikan ada 28 orang yang mengikuti isolasi terpusat,

atau bertambah 2 dibanding Minggu (6/2) lalu. Satu-satunya upaya yang dilakukan dengan isolasi terpusat agar virusnya tidak cepat menyebar.

Dikatakan, Kota Magelang tidak bisa menghindari, mengingat lokasi wilayah Kota Magelang yang merupakan lokasi persinggahan dan kota kecil. Selain protokol kesehatan harus lebih diperkuat, kegiatan vaksinasi diperkuat. Informasi yang diperoleh KR menyebutkan hingga pukul 07.00 jumlah pasien isolasi terpusat 28 orang, 13 orang laki-laki dan 15

orang perempuan. Kamar di lokasi isolasi terpusat yang terpakai 17 kamar, yang kosong 20 kamar.

Sementara itu Camat Magelang Selatan Andri Rudianto SSTP MSi secara terpisah kepada KR menyebutkan di wilayah Kecamatan Magelang Selatan terdapat 6 kelurahan, ada belasan Pokmas yang sudah terbentuk. Kegiatan seperti Senin kemarin sudah 2 kali dilakukan, hanya saja kegiatan yang pertama dan kedua sifatnya terbatas serta tidak melibatkan semua pendamping maupun lainnya. (Tha)

Partai Demokrat Boyolali Terima SK Pusat

BOYOLALI (KR) - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Boyolali, Rabu (2/2) lalu mendapat legalitas Surat Keterangan (SK) DPC Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Boyolali, Dwi Purwanto mengatakan, bahwa kader Partai Demokrat Boyolali telah melakukan rapat konsolidasi dan koordinasi partai dengan pengurus DPC maupun Pimpinan Anak Cabang (PAC). "Kami sudah melakukan rapat konsolidasi serta koordinasi de-

ngan pengurus DPC serta PAC, dan Alhamdulillah sudah mendapat legalitas SK partai, katanya kepada wartawan, Minggu (6/2). Dalam waktu dekat, pengurus DPC telah membentuk kepengurusan PAC dan hasilnya sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi partai dan hasilnya terbentuk juga kepengurusan ranting ranting. Jadi kepengurusan ranting tersebut sebagai ujung tombak dalam pemenangan Partai Demokrat pada 2024 mendatang.

Dwi Purwanto mengatakan, bahwa target pemenangan PD pada 2024 mendatang adalah dari tempat daerah pemilihan (dapil) adalah satu kursi. Pada pemilihan tahun sebelumnya PD Boyolali hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Makanya, pada tahun 2024 mendatang per dapil adalah satu kursi. Selain itu, dalam pemenangan 2024 nanti, PD berharap dapat mengangkat pemenangan pada pemilihan DPR tingkat Provinsi juga DPR tingkat Pusat.

"Kami berharap pada 2024 mendatang PD Boyolali dapat mewarnai pemilihan DPRD, DPR tingkat Jateng maupun DPR tingkat pusat, ikata Dwi Purwanto. Ditambahkan, dalam pemilihan presiden mendatang PD Boyolali juga ikut menyuksekkan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju dalam Pemilu 2024 mendatang. Melihat hasil survei, AHY sangat memuaskan sebagai modal untuk ikut berkompetisi dalam pemilu mendatang. (M-2)

Wartawan Turut Vaksinasi Booster

SEMARANG (KR) - Puluhan awak media, Senin (7/2) divaksin lanjutan booster di Mapolrestabes Semarang. Vaksinasi booster digelar atas kerja sama Wartawan Unit Polrestabes Semarang dengan Polrestabes Semarang dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, sekaligus Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ke-76, 9 Februari 2022.

Hal itu diungkapkan Koordinator Wartawan Unit Polrestabes Semarang, Agus Hermanto Senin (7/2) di Loby Ruang Presisi Command Center (PCC) Libas Mako Polrestabes Jalan Dokter Sutomo No. 19 Semarang. "Kegiatan vaksin dosis ketiga bertajuk 'Vaksin Booster untuk Peliput Hebat Semarang' (Libas)-HPN 2022 sinergi Wartawan Unit bersama Polrestabes Semarang," jelas Agus.

Ia menyebutkan kegiatan vaksinasi booster mendapat perhatian dari kalangan pers. Mereka yang mendaftar tidak kurang li-



KR-Karyono
Wartawan turut vaksinasi booster di Polrestabes Semarang.

ma puluh wartawan, baik media cetak, online, radio dan televisi. Adapun vaksin booster yang disuntikkan jenis Astra Zeneca yang disiapkan Seksi Dokkes Polrestabes Semarang, yang sekaligus menyiapkan tim screening dan tenaga vaksinator. iKami memberi apresiasi atas kepedulian kepolisian, khususnya kepada Kapolrestabes Semarang, Pak Irwan Anwar, yang memberi kado ulthah, berupa percepatan vaksin dosis ketiga untuk awak media

dalam peringatan Hari Pers Nasional kali ini," tuturnya.

Koordinator Wartawan Unit Polrestabes Semarang berharap rekan-rekan wartawan setelah disuntik makin bersemangat dan merasa nyaman saat meliput kegiatan penanganan Covid di Kota Semarang, termasuk kegiatan harian dukungan penanganan pandemi yang digelar Polrestabes bersama seluruh Polsek jajarannya.

Kapolrestabes Semarang

Kombes Pol Irwan Anwar, saat meninjau kegiatan vaksin booster untuk insan media mengatakan trend peningkatan angka positif Covid-19 di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, menjadi peringatan serius dan sudah seharusnya semua komponen masyarakat membantu pemerintah agar penanganan Covid di Kota Semarang, banyak yang bilang berhasil. Kegiatan PPKM berjalan efektif, vaksinasi melampaui target. Bahkan beberapa waktu yang lalu selama sehari-hari Kota Semarang zona positif covid. Kini saatnya harus kembali waspada, dengan varian Omicron, jangan langkah, siapa saja tetap harus disiplin prokes," ucapnya. (Cry)

Mimbar Legislatif

Dunia Kerja Perlu Serap Lulusan SMA/SMK

KOMISI E DPRD Jateng berharap dunia kerja di provinsi ini bisa maksimal mungkin menyerap tenaga kerja lulusan SMA/SMK. Untuk itu penyelenggaraan bursa kerja di daerah-daerah di Jawa Tengah perlu menyesuaikan potensi lulusan SMA/SMK yang ada. Hal ini disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, usai berdiskusi bersama Pemkab Wonogiri, Jumat (4/2). Diskusi dilakukan untuk memperdalam materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komisi E. Dengan diskusi tersebut Komisi E memperoleh gambaran riil pelaksanaan ketenagakerjaan di Jateng.

Dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri Komisi E mendapatkan penjelasan adanya beberapa program, yang salah satunya adalah inovasi jendela kerja. Program unovasi tersebut untuk menangkap secepat mungkin potensi lulusan SMA/SMK untuk masuk



KR-Budiono
Abdul Hamid

ke dunia kerja. Dengan inovasi tersebut Wonogiri berharap lulusan SMA/SMK bisa segera terserap lapangan kerja.

Detailnya, pemerintahan Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan link and match di dunia pendidikan yang bisa terintegrasi secara informasi dalam dunia kerja. Hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan Komisi E DPRD Jateng supaya bisa diakomodir. Mengena

inai permasalahan jaminan sosial, perlu adanya perhatian yang lebih, mengingat nantinya akan ada perubahan status kepesertaan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI). Komisi E berharap setelah dilakukan diskusi dengan Pemkab Wonogiri, ke depan apabila ada penyelenggaraan bursa kerja, harus dapat menangkap potensi dan peluang agar lulusan SMA/SMK banyak terserap dalam bursa kerja tersebut. □

(Disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)